

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan digunakan untuk menjadi sarana komunikasi bagi perusahaan untuk menginformasikan kondisi perusahaan, kinerja dan tanggung jawab manajemen kepada pihak internal dan eksternal perusahaan, keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya karena dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. (Fauzan, 2017). Dalam SFAC No.1 dijelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan diverifikasikan dari kebutuhan informasi pengguna eksternal yang tidak memiliki otoritas untuk menyusun informasi keuangan yang diinginkan mengenai suatu perusahaan yang akan lebih lanjut lagi digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Dijelaskan pula bahwa pihak eksternal yang dituju oleh informasi keuangan adalah pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan dan secara langsung terlibat dalam transaksi investasi, kredit dan perantara transaksi tersebut yang merupakan investor dan kreditor (Tya, 2016).

Laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi dapat menjadi pedoman atau acuan yang baik untuk bisa menentukan dan menetapkan keputusan investasi yang optimal (Fitriany, 2015). Atas kondisi tersebut, maka manajemen perusahaan wajib menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena penyajian laporan yang berkualitas berarti menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat mengurangi asimetri informasi (Ayu, 2018). Menurut Putu Tya (2017) salah satu faktor yang mengakibatkan kegiatan investasi menjadi kurang efisien yaitu dengan adanya asimetri informasi yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Jika dilihat dari perspektif investor beranggapan bahwa jika laba yang dihasilkan tinggi, tetapi kondisi yang sesungguhnya ternyata laba yang dihasilkan tidak sebanding atas apa yang diharapkan hal itu dapat mengakibatkan manajemen perusahaan berusaha

menutupi informasi dan cenderung berbuat curang demi memaksimalkan keuntungan.

Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mendukung rendahnya asimetri informasi agar dapat meningkatkan keterbukaan yang semakin jelas kepada pengguna laporan keuangan (Komalasari, 2016). Menurut Agung (2014) dengan banyaknya skandal akuntansi yang sering terjadi dan dikaitkan dengan kegagalan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan klien mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan dan hasil auditnya yang sebenarnya sangat penting bagi pengguna laporan keuangan karena digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis dan mengakibatkan adanya asimetri informasi yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara manajemen perusahaan dan pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit telah bebas dari salah saji material sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan kualitas audit laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, tetapi juga faktor eksternal salah satunya adalah *audit tenure* dan *audit delay* (Tiffany, 2014).

Di Indonesia, skandal kasus yang terjadi pada akhir Agustus 2018 dan melibatkan salah satu KAP *Big Four* adalah dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang merugikan 14 Bank di Indonesia dan KAP Deloitte Indonesia (Satro Bing, Eny & Rekan) yang dinilai tidak dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut dengan benar. Kasus ini diketahui setelah SNP Finance gagal bayar *Medium Term Notes* yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut.

Dilansir dalam Liputan6.com oleh Ilyas Istianur (2018), permasalahan ada terkait data yang diberikan oleh SNP Finance mengenai mekanisme pemberian pinjaman yang dilakukan sistem *executing* yaitu bank memberikan kredit berupa *joint financing* atau memberikan langsung ke perusahaan pembiayaan, kemudian SNP Finance meneruskannya kepada pengguna. Untuk mendapatkan kredit ini, terlebih dahulu auditor eksternal bertugas memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut dan auditor

yang ditunjuk adalah KAP Deloitte. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan analisis pokok dan menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran terhadap standar profesi akuntan terkait dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan SNP Finance tahun buku 2012-2016. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa KAP tersebut belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Sandar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance.

Dilansir pula oleh Laurensius dalam Kontan.co.id (2018), terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian mutu yang dimiliki KAP karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan. Hal ini berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama dan berdampak pada berkurangnya skeptisme profesional. Akibat skandal tersebut, KAP Satrio Bing, Eny & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior dan juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019.

Masa perikatan atau *audit tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *audit tenure* yang panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara *auditee* atau klien dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit (Fierdha, 2015). Masa perikatan audit juga menjadi perdebatan setelah dikeluarkannya peraturan mengenai Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang salah satunya membahas tentang pembatasan masa pemberian jasa bagi KAP yang sebelumnya dapat memerikan jasa audit umum paling lama lima tahun buku berturut-turut, sekarang menjadi enam tahun berturut-turut. Hamid (2013) berpendapat bahwa dengan masa perikatan yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Jika *audit tenure* yang dilakukan terlalu singkat maka dapat menyebabkan pengetahuan spesifik oleh auditor tentang kliennya masih sedikit sehingga kualitas audit menjadi rendah. Namun, apabila *audit*

tenure yang dilakukan terlalu panjang maka dapat menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan diantara kedua belah pihak.

Sebelum kasus SNP Finance, dilansir oleh Roy Franendya (2017) CNBC Indonesia pada tahun 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memberikan denda dan suspensi perdagangan saham 17 perusahaan tercatat (emiten) karena melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit periode 31 Desember 2016. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan dengan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan I-H tentang Sanksi. Mengacu pada peraturan tersebut, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-121 sejak lampaunya batas penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian tersebut.

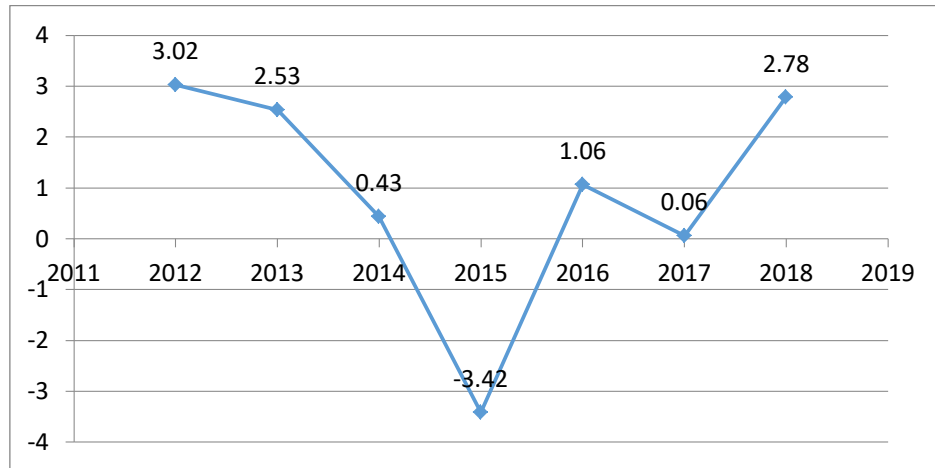
Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan syarat utama bagi peningkatan harga pasar saham perusahaan-perusahaan *go public*. BAPEPAM-LK menuntut perusahaan yang terdaftar dipasar modal untuk mempublikasi laporan keuangan auditan sebagai informasi yang sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis dengan jarak waktu penyelesaian audit laporan keuangan yang ikut mempengaruhi manfaat informasi laporan keuangan auditan yang dipublikasikan (Clinton, 2014). Bahkan lembaga ini juga mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang menyebutkan laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia selambat-lambatnya 120 hari dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di bidang akuntansi serta wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Menurut Ahmad dan Kamarudin (2014) *audit delay* adalah jumlah hari antara tanggal laporan keuangan audit dan tanggal laporan audit. Sedangkan menurut Halim (2014) *audit delay* atau *audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku

hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Jadi dapat dikatakan *audit delay* merupakan rentang waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen. Adanya pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit namun juga berdampak pada kualitas dari hasil audit. Ketepatan waktu suatu pelaporan keuangan atas hasil laporan audit dapat mempengaruhi nilai dari laporan keuangan tersebut.

Setelah banyaknya kasus keuangan yang terjadi di Indonesia, semakin banyak pula pihak luar yang bertanya tentang kualitas audit. Skandal keuangan tersebut melibatkan perusahaan besar dan KAP besar. Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menggunakan laporan keuangan sebagai tolak ukur pengambilan keputusan (Clinton,2014).

Junaidi & Nurdiono (2016) menyatakan bahwa kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional / intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Kualitas audit tergantung kemampuan teknis auditor yang terrepresentasi dalam pengalaman dan pendidikan profesi, dan independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas, di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (Halim, 2014). Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut dan didalam proses pengauditan, seorang auditor harus memiliki pegangan yang kuat sesuai dengan standar audit (Tiffany,2014).



Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan PDB sektor Pertambangan tahun 2012-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik

Saham sektor pertambangan sering menjadi sorotan dalam kegiatan investasi karena dinilai mampu untuk memberikan sumber penerimaan yang cukup besar dan memegang kendali dalam sektor perekonomian dunia (Ayu, 2018). Pada tahun 2013, Indonesia meraih peringkat kelima sebagai produsen batubara terbesar didunia (BP *Statistical review of World Energy*, 2015) yang mengakibatkan laju pertumbuhan PDB sektor pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan. Namun menurut data BPS, laju pertumbuhan PDB sektor pertambangan tahun 2015 memberikan kontribusi pendapatan terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Akan tetapi, ditengah melemahnya sektor pertambangan ini, beberapa perusahaan justru mendapatkan kenaikan laba atau keuntungan seperti PT Darma Henwa Tbk mencatat laba ditahun 2014 sebesar USD 83,07 menjadi USD 465,75 ribu pada tahun 2015 dan PT Batu Bara Bukit Asam Tbk juga mencatat laba dari tahun 2014 sebesar Rp 1,863 triliun menjadi Rp 2.037 triliun pada tahun 2015 sehingga kedua perusahaan ini mengalami kenaikan laba sebesar 9,30%. Hal ini berbanding terbalik dengan melemahnya pertumbuhan PDB untuk sektor pertambangan pada tahun yang sama (Ayu, 2018).

Dari fenomena diatas, terdapat indikasi bahwa perusahaan-perusahaan disektor pertambangan yang terdaftar di BEI cenderung menggunakan metode akuntansi dalam menaikkan atau menurunkan karena manajemen dapat menggunakan kebijakan dalam laporan keuangan untuk menurunkan dan menaikkan laba sesuai kepentingannya dengan tidak menyalahi prinsip-

prinsip akuntansi. Adanya kecenderungan diatas pula menyebabkan investor dapat meragukan kualitas laporan keuangan auditan dan dapat menimbulkan asimetri informasi karena dengan adanya informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajemen perusahaan daripada pengguna laporan keuangan maka manajemen perusahaan akan dengan mudah memanipulasi informasi yang ada di perusahaan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kualitas audit laporan keuangan yang dipengaruhi oleh *audit delay* dan *audit tenure* dapat mempengaruhi pada asimetri informasi sebuah perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh *Audit Delay* dan *Audit Tenure* Terhadap Asimetri informasi dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap asimetri informasi?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap asimetri informasi?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap asimetri informasi?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah pengaruh *audit delay* dan *audit tenure* terhadap asimetri informasi sebuah perusahaan melalui kualitas sebagai variable intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap asimetri informasi pada sebuah perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap asimetri informasi pada sebuah perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik.

4. Mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik.
5. Mengetahui pengaruh kualitas audit dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap asimetri informasi sebuah perusahaan.
6. Mengetahui pengaruh *audit delay* dan *audit tenure* terhadap asimetri informasi sebuah perusahaan melalui kualitas audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai *variable intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus kepada :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan *audit delay* dan *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit dan asimetri informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Bagi Perusahaan, sebagai informasi tambahan referensi tentang cara menganalisis *audit delay* dan *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit dan hubungannya dengan pengambilan keputusan investor.
3. Bagi Kantor Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi referensi dalam melakukan perencanaan audit yang lebih baik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit.
4. Bagi Akademisi, sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada pengembangan ilmu audit dalam kaitannya untuk memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga instansi yang terkait, serta sebagai bahan untuk meningkatkan relevansi kurikulum program pendidikan di Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya dengan dunia kerja.
5. Bagi Pihak Lain, sebagai bahan perbandingan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berniat dengan pembahasan mengenai identifikasi apakah kebijakan *audit tenure* dan efektif sebagai alat untuk menjaga kualitas auditor dan hubungannya dengan asimetri informasi.

5.4 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Audit Delay* dan *Audit Tenure* Terhadap Asimetri informasi *dengan* Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating” ini memiliki sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teori yang mendasari pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yang terdiri dari Penganggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Kinerja Publik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan pengambilan data dan analisis data yang akan dilakukan. Bagian pengambilan data berisi dengan sumber datanya, teknik pengambilan serta tahapan penelitian.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil statistik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil kesimpulan penelitian beserta dengan saran mengenai keterbatasan penelitian yang dilakukan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan